

PB 15 - 08/2025



STRATEGI MEWUJUDKAN SUPERAPP GOVERNMENT BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN LAYANAN PUBLIK

Dewi Oktaviani - Analisis Kebijakan Ahli Muda
Dewi Sartika - Analisis Kebijakan Ahli Muda

Pendahuluan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah memberikan pernyataan bahwa pemerintah saat ini memiliki sekitar 24.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Aplikasi-aplikasi itu dianggap tidak beroperasi secara multifungsi, sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara. Untuk itu, pemerintah akan melakukan intergovernmental connection atau integrasi data yang akan disederhanakan dalam satu database yang diyakini dapat menghemat biaya operasi pemerintah agar lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security.

Pernyataan Menkeu tersebut direspon oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang memastikan bahwa pihaknya bakal menutup aplikasi-aplikasi tersebut secara bertahap dan menggantinya dengan aplikasi super (SuperApp), yang salah satunya diperuntukkan bagi ASN. Namun, mengingat untuk menghapus sejumlah aplikasi tersebut tidaklah mudah, terutama bagi aplikasi yang sudah cukup familiar dipergunakan oleh ASN untuk mendukung kinerjanya selama ini dalam layanan publik. Untuk itu, dibutuhkan adanya pemetaan dan skala prioritas untuk menentukan aplikasi yang memang harus ada ataupun dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.

Policy Brief Series

Agustus 2025



Ditujukan Kepada

Kementerian Komdigi,
KemenPAN-RB, BKN, LAN

Ringkasan Eksekutif

Sekitar 24.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga (K/L) baik dipusat dan daerah, dianggap tidak beroperasi secara multifungsi dan tidak saling terintegrasi, sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran negara. Hal ini disebabkan belum adanya payung aplikasi, tingginya ego sektoral dan rendahnya kolaborasi antara digital leader dan digital talent, sehingga semakin sulit untuk menciptakan metode fleksibilitas bekerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan menciptakan ASN yang multitasking dalam layanan publik. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan Superapps Government yang diperuntukkan bagi ASN dan layanan publik dengan sistem Single Sign On (SSO), yang melibatkan peran: 1). Kementerian Kominfo sebagai penanggungjawab SuperApps Government; 2). Kementerian PANRB, BKN dan LAN sebagai penanggungjawab SPBE dan metode fleksibel bekerja dan multitasking bagi ASN; dan 3). KSP sebagai pengendali atas program-program yang bersifat nasional. Untuk itu, rekomendasi kebijakan diarahkan agar segera menerbitkan Peraturan yang terkait tentang Superapps Government, dan Peraturan tentang fleksibilitas bekerja dan menciptakan multitasking bagi ASN



Seperti yang diketahui bahwa keberadaan dan kegunaan aplikasi-aplikasi tersebut, hingga saat ini berbaran tidak hanya di pemerintah pusat saja melainkan juga di pemerintah daerah. Aplikasi-aplikasi tersebut pun memiliki sistem yang bekerja sendiri-sendiri dan tidak saling terintegrasi. Hal ini dikarenakan belum adanya payung aplikasi yang dikhususkan bagi ASN, sehingga harus log in di setiap aplikasi yang ada. Oleh karena itu, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi tersebut, mencerminkan tingginya ego sektoral dan rendahnya kolaborasi antar digital leader selaku pengambil kebijakan dan digital talent selaku pengembang aplikasi, dan ini semakin sulit untuk menciptakan metode fleksibilitas bekerja bagi ASN, dan metode untuk menciptakan ASN yang multitasking. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antar pihak dengan baik dan saling terintegrasi, untuk menciptakan SuperApp Government yang memiliki banyak fungsi aplikasi yang tergabung dalam satu ekosistem khusus yang diperuntukkan bagi ASN, dengan menerapkan Single Sign On (SSO) yang akan menghubungkan seluruh layanan (government administration superapp).

Badan Kepegawaian Negara termasuk salah lembaga yang telah melakukan penyederhanaan proses layanan kepegawaian yaitu layanan kenaikan pangkat 14 tahap menjadi 2 tahap, layanan pensiun 8 tahap menjadi 3 tahap, layanan pindah instansi 11 tahap menjadi 3 tahap. Langkah ini boleh dikatakan sebagai langkah awal untuk mengintegrasikan semua layanan publik di pemerintahan dalam satu aplikasi. Sulitnya mewujudkan Superapp Government yang memiliki banyak fungsi aplikasi yang tergabung dalam satu ekosistem yang khusus diperuntukkan bagi ASN, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, mengingat untuk menghapus sejumlah aplikasi tersebut tidaklah mudah, terutama bagi aplikasi yang sudah cukup familiar dipergunakan oleh ASN untuk mendukung kinerjanya selama ini. Salah satu contoh Aplikasi PeduliLindungi tergolong superapps, dengan total akses tidak kurang dari 26 juta orang karena untuk vaksin, jika semua bisa terkoneksi, diperkirakan akan ada 180 juta akses orang (di bidang penanganan Covid-19 ini).

Sebenarnya untuk meredam hal tersebut dapat terjadi, telah ada Perpres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang difungsikan salah satunya untuk mendukung kinerja bagi ASN, namun tampaknya kurang dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini bisa berdampak pada profesionalitas kinerja ASN, terlebih untuk mendukung kinerja bagi ASN kedepannya akan menerapkan metode fleksibilitas bekerja bagi ASN serta menciptakan ASN yang multitasking.

Metode fleksibilitas bekerja dan menciptakan ASN yang multitasking, memang sampai saat ini masih terus dilakukan pembahasan dan penyempurnaan dalam kebijakan maupun pedomankerja, sehingga hampir disetiap instansi mencoba untuk menciptakan metode dengan aplikasinya masing-masing, yang hanya diberlakukan untuk instansinya saja. Seperti di Bappenas telah ada Integrated Digital Workspace, di Kementerian Keuangan telah ada flexible working space, BRIN telah ada Coworking Space, dan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ada Flexible Working Arrangement. Dimana, penerapan metode ini juga menggunakan aplikasi SPBE, My SAPK, SIMPEGNAS, dan SIASN, walaupun belum menerapkan SSO.

Untuk menciptakan ASN yang multitasking setidaknya harus mampu mengembangkan metode kompetensi secara terintegrasi, yaitu dengan pengembangan kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Dan, pengembangan kompetensi yang dilakukan harus mampu menggunakan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university). (sesuai Pasal 203 PP No.17/2020 perubahan PP No.11/2017).

Kolaborasi merupakan faktor penting bagi terwujudnya strategi karena tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa mempengaruhi aktor lain. Ekosistem kolaboratif melibatkan pemerintah, media, akademisi, komunitas, dan swasta. Komunitas yaitu masyarakat dan generasi muda berperan menyampaikan gagasan, ide dan inovasi serta menjembatani pemerintah dan masyarakat. Media berperan mendukung internalisasi kebijakan reformasi birokrasi kepada stakeholder serta menyampaikan berbagai praktik baik/ inovasi melalui komunikasi dua arah, Sektor swasta berperan dalam perumusan kebijakan dan berkolaborasi dalam implementasi pelayanan publik melalui inovasi-inovasi dari sektor swasta. Sedangkan akademisi terlibat dalam memperkuat kebijakan reformasi birokrasi dengan data dan analisa akademik (evidence-based policy). (Kementerian PAN-RB, 2024)

Pergeseran paradigma digitalisasi yakni dari unsustainable menjadi sustainability and Green IT yang berfokus pada penggunaan teknologi hijau dan berkelanjutan;

pengalaman parsial menjadi holistic customer experience yang berfokus pada memberikan pengalaman berkesan pada keseluruhan journey pengguna layanan melalui pengintegrasian berbagai channel digital secara serasi, personalisasi dan mengantisipasi kebutuhan pengguna layanan; conventional workplace menjadi remote and hybrid work environments yang dipicu pandemi Covid-19 sehingga terjadi pergeseran ke model kerja jarak jauh dan hybrid yang ditunjang oleh teknologi yang memungkinkan terbentuknya flexible work arrangements, collaboration tolos dan virtual team engagement; kebijakan etika digital yang memungkinkan artificial intelligence tidak diikuti dengan masalah privasi dan etika karena adanya kebijakan yang menaungi. (Taufiq, 2024)

Deskripsi Permasalahan

Superapp Government merupakan bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana pada pembahasan ini ditujukan pada integrasi pelayanan internal atau interoperabilitas antar-sistem di lingkup pemerintahan. Berkaca pada negara Inggris, Estonia dan Australia. Negara Inggris mampu mengkonsolidasikan kurang lebih 2.000 website menjadi 1 portal sehingga memiliki platform Government UK, Estonia dengan Eesti.ee dan Australia dengan MyGov sehingga dapat diadopsi negara lainnya. Negara Estonia sudah melakukan 99% digitalisasi layanan publik demikian halnya dengan Negara Australia yang telah melakukan 90% digitalisasi layanan publik. Ketiga negara telah memiliki lembaga terpusat untuk koordinasi, strategi, kebijakan dan implementasi dan 1 portal untuk seluruh layanan publik berbasis identitas digital sehingga tidak mustahil jika ini diterapkan untuk negara Indonesia.

Percepatan transformasi digital memanfaatkan fondasi yang sudah ada yakni fondasi kebijakan dari Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga sudah terdapat fondasi tata kelola yakni Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk koordinasi dan penerapan kebijakan serta Arsitektur SPBE Nasional sebagai kerangka dasar keterpaduan dan penyaluran.

Saat ini sedang disusun Perpres No 82 Tahun 2023 untuk mempercepat kemajuan dengan 3 cara utama yakni memperkuat tata kelola melalui keterlibatan Kementerian Koordinator dan Kementerian/ Lembaga terkait, membangun kemampuan implementasi -

Pemerintah melalui GovTech dan berfokus pada layanan digital prioritas untuk integrasi/ interoperabilitas. Disinilah bertemu urgensi lahirnya superapp Government bagi aparatur sipil negara. (Kementerian PAN-RB, 2024)

Alternatif Solusi

Menerbitkan Peraturan Presiden tentang Superapps Government. Ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan terkait belum adanya payung aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat secara terintegrasi, banyaknya aplikasi dengan berbagai tujuan penggunaan mensyaratkan untuk log in di setiap aplikasi yang ada. Aktor kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara Kominfo, KemenpanRB, LAN, BKN, DPR. Hal ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Sosialisasi Superapps Government. Konsep SuperApps Government merupakan dukungan teknologi digital bagi ASN untuk mendukung fleksibilitas bekerja dan pengembangan kompetensi (massive online open courses, blended learning, micro mobile elearning, distance learning) yang terintegrasi dalam satu aplikasi. SuperApp Government bagi ASN untuk menciptakan ASN yang unggul dan berintegritas serta mengembangkan kompetensi secara profesional dengan memanfaatkan TIK untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, efektif, dan efisien. Manfaat konsep SuperApp antara lain: menjadi satu aplikasi yang memberikan banyak layanan, data yang dikelola akan super banyak, memberikan kemudahan mengakses dalam device dan menghemat memory smartphone, dan banyak fungsi-fungsi aplikasi yang tergabung dalam satu ekosistem.
- Sosialisasi, internalisasi, dan edukasi dilakukan melalui media sosial secara massif
- Menjaring dunia usaha untuk terlibat program kegiatan SPBE.

Menerbitkan Peraturan Presiden tentang fleksibilitas bekerja dan menciptakan multitasking bagi ASN. Aktor kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara KemenpanRB, LAN, BKN dan KSP. Hal ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Penyesuaian penerapan metode fleksibilitas kinerja ASN. Metode fleksibel bekerja bagi ASN menjadi salah satu layanan yang diberikan dalam SuperApp Government, yang berisi antara lain: SPBE dan 3 pilar aplikasi SSO (My SAPK, SIMPEGNAS, SIASN).





- Penyesuaian penerapan metode multitasking kinerja ASN. ASN multitasking harus didukung dengan adanya pengembangan metode pengembangan kompetensi secara terintegrasi, yaitu dengan pengembangan kompetensi yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Dan, pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (corporate university). (sesuai Pasal 203 PP No.17/2020 perubahan PP No.11/2017).
- Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ASN seiring dengan berkembangnya platform digital harus sesuai dengan pembelajaran terintegrasi dalam corporate university. Skenario corporate university ini terbagi dua yaitu secara offline dan online (mandiri, elearning, class room learning, working place learning, dialogue, online community).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan arah rekomendasi, maka untuk mewujudkan SupperApps Government yang dikhususkan untuk ASN jelas membutuhkan effort dan kerjasama yang baik dengan berbagai stakeholder, membutuhkan reward yang besar untuk mengakselerasi SPBE, kapabilitas yang sama dalam pelaksanaan SPBE di pusat dan daerah, serta metode fleksibilitas bekerja dan multitasking bagi ASN yang siap untuk diimplementasikan (sampai saat ini masih terus dilakukan pembahasan). Untuk itu, strategi yang dapat dilakukan yaitu:

- Untuk jangka pendek, pemerintah harus segera mematangkan metode fleksibilitas bekerja dan metode menciptakan ASN yang multitasking (sinergitas dan integrasi dari aplikasi SPBE, My SAPK, SIMPEGNAS, SIASN, Corporate University), yang akan dikemas untuk dapat diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden.
- Langkah ini dapat diawali dengan melakukan sosialisasi secara intensif ke seluruh stakeholder melalui media sosial secara massif, kemudian membentuk gugus tugas percepatan penerapan SPBE di setiap Kementerian/Lembaga dan atau Pemerintah Daerah, menjaring dunia usaha untuk keterlibatan kolaborasi program kegiatan SPBE, menjaring Akademisi dan LSM/ NGO untuk membantu efektivitas pelaksanaan SPBE; memperkuat Talenta Digital Generasi Milenial untuk mendorong percepatan SPBE;

- Penanaman (embedding) core values ASN ber-Akhlak dan employer branding ASN “Bangga melayani bangsa”, dan penyesuaian penerapan metode fleksibilitas kinerja ASN, serta penerapan metode multitasking kinerja ASN.
- Untuk jangka panjang, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Superapps Government sebagai payung aplikasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat yang secara terintegrasi dan tergabung dalam satu ekosistem (menggunakan sistem SSO) yang salah satu fungsinya ditujukan bagi ASN.

SuperApp Government merupakan satu aplikasi yang memberikan kemudahan akses dalam perangkat (device) dengan banyak fungsi-fungsi aplikasi yang tergabung dalam satu ekosistem, yang salah satunya diperuntukkan bagi ASN (Aplikasi SDM) dengan menerapkan sistem SSO yang akan menghubungkan keseluruhan layanan (government administration superapp). Untuk mewujudkan SuperApp Government ini diperlukan kolaborasi dalam sistem digital leader and digital talent yang baik dan saling terintegrasi, dengan melibatkan peran:

1. Kementerian Kominfo sebagai penanggungjawab SupperAppsGovernment;
2. Kementerian PANRB, BKN dan LAN sebagai penanggungjawab SPBE dan metode fleksibel bekerja dan multitasking bagi ASN. Untuk itu, pemerintah diharapkan agar segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Superapps Government, dan Peraturan Presiden tentang fleksibilitas bekerja dan menciptakan multitasking bagi ASN

Daftar Pustaka

- Indonesia, C. (2022). 24.000 Aplikasi Pemerintah Mau Disuntik Mati, Ini Gantinya. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220713082836-37-355138/24000-aplikasi-pemerintah-mau-disuntik-mati-ini-gantinya>
- Kominfo.go.id. (2021). Jadi Pilar Utama Ekonomi Digital, Kominfo Pantau Kualitas Pos dan Logistik. https://m.kominfo.go.id/content/detail/31883/jadi-pilar-utama-ekonomi-digital-kominfo-pantau-kualitas-pos-dan-logistik/0/berita_satker
- Taufiq, M. (2024). Bureaucratic Reform and Happy Digital Public Service. www.lan.go.id